



Gerakan Menuju
Kota Cerdas
**(Smart City)
2024**

**LAPORAN HASIL EVALUASI TAHAP II
IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY)
TAHUN 2024
KAB. TABALONG**

Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Smart City Tahap II Tahun 2024
untuk 191 Kabupaten/Kota

Jakarta, 25 November 2024

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 Tanggal 6 September 2024 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

1. Dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode 2017-2022 terdapat seratus enam puluh lima (165) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* melalui tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 29 Oktober – 20 November 2024. Sedangkan terdapat dua puluh enam (26) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* dan tidak menghadiri kegiatan evaluasi dimaksud (daftar terlampir);
2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) pada tujuh puluh lima kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2022 dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
 - a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, keamanan informasi serta anggaran untuk program *smart city*;

- c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan.
Penghitungan dampak (*impact*) dilakukan menggunakan metode survei dilakukan terhadap lima puluh (50) responden untuk setiap program dari enam (6) dimensi *smart city* (*smart governance, smart economy, smart living, smart society, smart environment, dan smart branding*); 50 orang x 6 dimensi = 300 orang responden, yakni masyarakat yang sudah menggunakan layanan/program, dan merasakan dampak layanan/program dimaksud
 - d. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah; dan
 - e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi pada program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pemerintah kota/kabupaten.
3. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) yang berada pada enam puluh enam (66) kota/kabupaten pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru, berdasarkan enam (6) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni: *Baseline* (bobot 10%), *Output* (bobot 20%), *Impact* (bobot 20%), *Outcome* (bobot 20%), Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), dan penilaian program kolaborasi (bobot 10%). Adapun program kolaborasi, mencakup jumlah program inovasi yang dilakukan secara mandiri oleh kota/kabupaten, dan atau berkolaborasi dengan kota/kabupaten lainnya pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru
4. Hasil penilaian dari berbagai dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:
 - a. Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline, Output, Outcome, Impact, dan Quick Win*.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

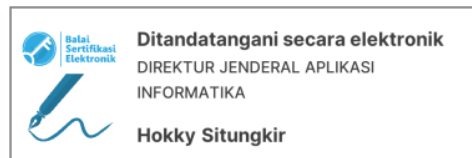
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

- b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*). Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata Baseline, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.
5. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Hokky Situngkir

Tembusan Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran I
Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Tanggal : 25 November 2024

Kepada Yth.

1	Bupati Badung	101	Bupati Semarang
2	Bupati Bandung	102	Bupati Siak
3	Bupati Banggai	103	Bupati Sidoarjo
4	Bupati Bangka Selatan	104	Bupati Simalungun
5	Bupati Banjar	105	Bupati Situbondo
6	Bupati Bantul	106	Bupati Sleman
7	Bupati Banyuasin	107	Bupati Solok
8	Bupati Banyumas	108	Bupati Sragen
9	Bupati Banyuwangi	109	Bupati Subang
10	Bupati Batang	110	Bupati Sukabumi
11	Bupati Bekasi	111	Bupati Sukoharjo
12	Bupati Belitung	112	Bupati Sumbawa
13	Bupati Belitung Timur	113	Bupati Sumbawa Barat
14	Bupati Bengkulu Utara	114	Bupati Sumedang
15	Bupati Blitar	115	Bupati Sumenep
16	Bupati Blora	116	Bupati Tabalong
17	Bupati Bogor	117	Bupati Tabanan
18	Bupati Bojonegoro	118	Bupati Tangerang
19	Bupati Boyolali	119	Bupati Tapanuli Selatan
20	Bupati Brebes	120	Bupati Tapanuli Utara
21	Bupati Buton	121	Bupati Temanggung
22	Bupati Cirebon	122	Bupati Toba
23	Bupati Dairi	123	Bupati Trenggalek
24	Bupati Deli Serdang	124	Bupati Tuban
25	Bupati Demak	125	Bupati Wakatobi
26	Bupati Gresik	126	Bupati Wonogiri
27	Bupati Grobogan	127	Bupati Wonosobo
28	Bupati Gunungkidul	128	Walikota Ambon
29	Bupati Halmahera Selatan	129	Walikota Balikpapan
30	Bupati Halmahera Tengah	130	Walikota Banda Aceh
31	Bupati Halmahera Timur	131	Walikota Bandar Lampung

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

32	Bupati Halmahera Utara	132	Walikota Bandung
33	Bupati Humbang Hasundutan	133	Walikota Banjarbaru
34	Bupati Indramayu	134	Walikota Banjarmasin
35	Bupati Jember	135	Walikota Batam
36	Bupati Jembrana	136	Walikota Batu
37	Bupati Jepara	137	Walikota Bau-Bau
38	Bupati Jombang	138	Walikota Bekasi
39	Bupati Karanganyar	139	Walikota Binjai
40	Bupati Karawang	140	Walikota Bitung
41	Bupati Karo	141	Walikota Bogor
42	Bupati Katingan	142	Walikota Bontang
43	Bupati Kebumen	143	Walikota Bukittinggi
44	Bupati Kendal	144	Walikota Cilegon
45	Bupati Klaten	145	Walikota Cimahi
46	Bupati Klungkung	146	Walikota Cirebon
47	Bupati Konawe Selatan	147	Walikota Denpasar
48	Bupati Kotawaringin Timur	148	Walikota Depok
49	Bupati Kudus	149	Walikota Dumai
50	Bupati Kulonprogo	150	Walikota Jambi
51	Bupati Kuningan	151	Walikota Jayapura
52	Bupati Kutai Barat	152	Walikota Kediri
53	Bupati Kutai Kartanegara	153	Walikota Kupang
54	Bupati Kutai Timur	154	Walikota Madiun
55	Bupati Lamongan	155	Walikota Magelang
56	Bupati Langkat	156	Walikota Makassar
57	Bupati Lima Puluh Kota	157	Walikota Malang
58	Bupati Lombok Barat	158	Walikota Manado
59	Bupati Lombok Tengah	159	Walikota Mataram
60	Bupati Lombok Timur	160	Walikota Medan
61	Bupati Lombok Utara	161	Walikota Mojokerto
62	Bupati Luwu Timur	162	Walikota Padang
63	Bupati Luwu Utara	163	Walikota Padang Panjang
64	Bupati Magelang	164	Walikota Palembang
65	Bupati Magetan	165	Walikota Palopo
66	Bupati Majalengka	166	Walikota Pangkal Pinang
67	Bupati Malang	167	Walikota Pariaman
68	Bupati Manggarai	168	Walikota Pasuruan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

69	Bupati Manggarai Barat	169	Walikota Payakumbuh
70	Bupati Manggarai Timur	170	Walikota Pekalongan
71	Bupati Maros	171	Walikota Pekanbaru
72	Bupati Mimika	172	Walikota Pontianak
73	Bupati Minahasa	173	Walikota Probolinggo
74	Bupati Minahasa Utara	174	Walikota Samarinda
75	Bupati Mojokerto	175	Walikota Semarang
76	Bupati Morowali	176	Walikota Serang
77	Bupati Muara Enim	177	Walikota Sibolga
78	Bupati Musi Banyuasin	178	Walikota Singkawang
79	Bupati Musi Rawas	179	Walikota Sukabumi
80	Bupati Ngada	180	Walikota Surabaya
81	Bupati Nganjuk	181	Walikota Surakarta
82	Bupati Ngawi	182	Walikota Tangerang
83	Bupati Ogan Komering Ilir	183	Walikota Tangerang Selatan
84	Bupati Pacitan	184	Walikota Tanjung Balai
85	Bupati Padang Pariaman	185	Walikota Tanjungpinang
86	Bupati Pakpak Bharat	186	Walikota Tasikmalaya
87	Bupati Paser	187	Walikota Tebing Tinggi
88	Bupati Pasuruan	188	Walikota Tegal
89	Bupati Pati	189	Walikota Ternate
90	Bupati Pelalawan	190	Walikota Tomohon
91	Bupati Pematang	191	Walikota Yogyakarta
92	Bupati Penajam Paser Utara		
93	Bupati Ponorogo		
94	Bupati Probolinggo		
95	Bupati Pulau Morotai		
96	Bupati Purwakarta		
97	Bupati Purworejo		
98	Bupati Raja Ampat		
99	Bupati Rembang		
100	Bupati Samosir		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHAP II TAHUN 2024
 PADA 191 KOTA/KABUPATEN
 PROGRAM GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) PERIODE TAHUN 2017-2022**

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
1	KAB. BADUNG	3,56	2,73	3,27	3,18	2,8		3,08	0,11	REGULER
2	KAB. BANDUNG	2,72	2,69	3,24	2,85	3,28		3,01	0	REGULER
3	KAB. BANGGAI	3,76	2,49	3,3	2,97	3,05		3,07	-0,07	REGULER
4	KAB. BANGKA SELATAN	2,24	2,29	2,01	1,52	1,88		1,97	-0,29	REGULER
5	KAB. BANJAR	2,72	2,02	2,65	2,44	2,17		2,39	-0,03	REGULER
6	KAB. BANTUL	3,96	3,64	3,78	3,26	3,97	3,97	3,72	0,16	KPPN IKN
7	KAB. BANYUASIN	3,8	3,25	3,08	3,44	3,35		3,31	0,44	REGULER
8	KAB. BANYUMAS	3,68	3,64	3,41	3,04	3,78		3,48	0,06	REGULER
9	KAB. BANYUWANGI	4	3,78	3,75	3,79	2,97		3,63	0,33	REGULER
10	KAB. BATANG	3,84	3,35	3,59	3,6	3,67		3,59	0,19	REGULER
11	KAB. BEKASI	3,6	3,05	3,3	3,04	3,33		3,23	0,42	REGULER
12	KAB. BELITUNG	3,52	2,96	2,87	3,19	2,87	1,67	2,9	0,06	KPPN IKN
13	KAB. BELITUNG TIMUR	2,28	2,2	2,34	2,13	1,53	2,17	2,09	0,63	KPPN IKN
14	KAB. BENGKULU UTARA	2,76	2,2	2,76	2,69	2,52		2,59	0,8	REGULER
15	KAB. BLITAR	3,52	3,2	3,26	3	3,1		3,19	-0,1	REGULER
16	KAB. BLORA	2,6	1,76	2,39	2,9	1,28		2,17	0,02	REGULER
17	KAB. BOGOR	3,96	3,15	3,22	3,04	2,85		3,17	0,07	REGULER
18	KAB. BOJONEGORO	3,32	3,15	3,45	3,11	3,77		3,37	0,3	REGULER
19	KAB. BOYOLALI	3,76	3,49	3,61	3,82	3,53	3,53	3,62	0,32	KPPN IKN
20	KAB. BREBES	1,72	1,98	2,48	2,49	1,58		2,13	0,49	REGULER
21	KAB. CIREBON	2,96	2,76	3,19	2,98	2,55		2,91	-0,04	REGULER
22	KAB. DELI SERDANG	3,64	2,98	3,32	3,35	3,78		3,38	0,15	REGULER
23	KAB. DEMAK	4	3,8	3,65	3,73	3,92	3,8	3,8	0,17	KPPN IKN
24	KAB. GRESIK	3,88	3,04	3,38	3,27	3,55		3,37	0,24	REGULER
25	KAB. GROBOGAN	3,8	3,33	3,13	3,63	3,87		3,49	0,32	REGULER
26	KAB. GUNUNGKIDUL	3,96	3,76	3,52	4	3,9	3,8	3,81	0,15	KPPN IKN
27	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	2,16	1,8	1,97	2,85	1,58		1,86	-0,27	KPPN IKN
28	KAB. INDRAMAYU	3,36	2,8	3,15	2,8	3,05		3,01	0,24	REGULER
29	KAB. JEMBER	3,6	2,84	2,88	2,84	3,17		2,99	0,3	REGULER
30	KAB. JEMBRANA	3,36	2,76	3,28	2,8	2,32		2,9	0,18	REGULER
31	KAB. JEPARA	3,6	2,82	2,88	2,9	2,48	1,1	2,69	-0,51	KPPN IKN
32	KAB. JOMBANG	3,8	2,84	2,85	3,24	2,87		3,03	-0,37	REGULER
33	KAB. KARANGANYAR	2,92	2,62	2,93	3,03	2,55	1,53	2,67	0,21	KPPN IKN
34	KAB. KARAWANG	2,8	2,89	2,79	2,03	3,45		2,79	0,21	REGULER
35	KAB. KARO	2,8	2,24	2,72	2,8	2,12		2,26	0,1	KPPN IKN
36	KAB. KATINGAN	3,2	3	2,78	2,96	2,88		2,92	0,17	REGULER
37	KAB. KEBUMEN	3,8	3,09	3,59	3,34	2,97		3,34	-0,03	REGULER
38	KAB. KENDAL	3,96	3,44	3,58	3,44	3,82	2,93	3,55	0,1	KPPN IKN
39	KAB. KLATEN	3,8	3,35	3,18	3,27	2,83	1,87	3,09	-0,08	KPPN IKN
40	KAB. KLUNGKUNG	3,52	2,49	3,09	3,07	2,95		2,98	0,44	REGULER
41	KAB. KONawe SELATAN	3,64	2,69	2,96	2,33	2,55	3,2	2,79	0,47	KPPN IKN
42	KAB. KUDUS	3,68	3,25	3,61	3,23	3,57	3,2	3,42	0,11	KPPN IKN
43	KAB. KULON PROGO	3,68	3,16	3,22	3,27	3,35	3,73	3,34	0,02	KPPN IKN
44	KAB. KUNINGAN	2,52	2,44	2,7	2,65	3,28		2,74	0,24	REGULER
45	KAB. KUTAI BARAT	1,72	2,05	2,46	2,47	1,95	1,7	2,13	0,9	KPPN IKN
46	KAB. KUTAI KARTANEGARA	2,2	2,42	2,85	1,37	2,63	1,7	2,24	-0,58	KPPN IKN
47	KAB. KUTAI TIMUR	2,64	2,65	2,27	3,14	2,45		2,59	-0,37	REGULER
48	KAB. LAMONGAN	3,16	2,62	2,92	3,14	2,77		2,9	0,62	REGULER
49	KAB. LANGKAT	3,24	2,6	2,92	2,89	3,35		2,97	-0,03	REGULER
50	KAB. LIMA PULUH KOTA	2,56	2,38	2,55	3,01	2,52		2,6	1,05	REGULER
51	KAB. LOMBOK BARAT	3,84	3,64	3,5	3,34	3,85	2,77	3,53	0,61	KPPN IKN
52	KAB. LOMBOK TIMUR	3,08	1,85	2,33	2,51	2,13	1	2,17	0,31	KPPN IKN
53	KAB. LOMBOK UTARA	3,84	3,22	3,11	3,06	3,13		2,89	0,19	KPPN IKN
54	KAB. MAGELANG	3,76	3,51	3,51	3,07	3,08	3,77	3,39	0,58	KPPN IKN
55	KAB. MAGETAN	3,88	2,76	3,44	2,74	2,63		3,05	-0,2	REGULER
56	KAB. MAJALENGKA	2,28	2,49	2,95	1,4	1,48		2,19	-0,19	REGULER
57	KAB. MALANG	3,56	2,89	3,35	3,07	3	2,43	3,06	0,12	KPPN IKN
58	KAB. MANGGARAI	3,56	2,36	2,65	2,49	2,7	1,83	2,58	-0,09	KPPN IKN
59	KAB. MANGGARAI BARAT	2,44	2,45	2,92	3,16	2,62	2,04	2,68	0,01	KPPN IKN
60	KAB. MANGGARAI TIMUR	2,08	1,56	2,15	2,46	1,38		1,72	-0,49	KPPN IKN
61	KAB. MIMIKA	1,92	1,58	2,07	2,4	1,47		1,9	-0,57	REGULER
62	KAB. MINAHASA UTARA	1,2	1,15	1,83	1,22	1,28	1	1,32	-0,42	KPPN IKN
63	KAB. MOJOKERTO	3,88	3,51	3,34	3,28	2,73		3,29	-0,04	REGULER
64	KAB. MUARA ENIM	1,84	2,89	2,33	2,69	2,22		2,44	-0,24	REGULER
65	KAB. MUSI RAWAS	2,24	1,6	2,59	2,03	1,58		2,04	-0,01	REGULER

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
66	KAB. NGANJUK	3,24	3	3,47	3,4	3,6		3,37	-0,01	REGULER
67	KAB. NGAWI	3,92	3,04	3,56	3,33	3,1		3,35	0,26	REGULER
68	KAB. PADANG PARIAMAN	3,76	2,89	3	3,11	3,43		3,16	-0,04	REGULER
69	KAB. PAKPAK BHARAT	3,48	2,25	2,78	3,14	2,48	1,1	2,59	0,33	KPPN IKN
70	KAB. PASER	3,84	3,18	3	3,03	2,8	2,53	3,04	0,2	KPPN IKN
71	KAB. PATI	3,2	2,55	2,9	3,22	2,47		2,84	0	REGULER
72	KAB. PELALAWAN	1,72	1,8	2,15	1,39	1,2		1,7	-0,33	REGULER
73	KAB. PEMALANG	2,4	1,89	2,67	3,1	1,78		2,4	-0,06	REGULER
74	KAB. PENAJAM PASER UTARA	2,44	2	2,61	2,96	2,07		2,43	0,79	REGULER
75	KAB. PONOROGO	2	1,6	1,66	1,21	1,6		1,58	-0,95	REGULER
76	KAB. PROBOLINGGO	3,28	3,02	3,2	3,19	2,12	2,35	2,87	0,41	KPPN IKN
77	KAB. PULAU MOROTAI	2,64	1,65	2,4	3,19	2,45	1,37	2,34	0,07	KPPN IKN
78	KAB. PURWAKARTA	3,48	2,69	3,12	3,4	2,77		3,06	0,1	REGULER
79	KAB. PURWOREJO	2,52	2,53	2,93	3,04	2,42	2,17	2,65	0,4	KPPN IKN
80	KAB. REMBANG	2,8	2,24	2,67	3,04	2,17		2,57	0,23	REGULER
81	KAB. SEMARANG	2,92	2,47	2,62	2,76	2,85	2,03	2,64	0,13	KPPN IKN
82	KAB. SIAK	2,72	2,35	2,78	2,83	3,58		2,86	0,05	REGULER
83	KAB. SIDOARJO	3,28	3,15	3,55	3,48	3,23		3,37	0,36	REGULER
84	KAB. SIMALUNGUN	2,08	1,71	2,15	2,19	1,43	1	1,8	0,32	KPPN IKN
85	KAB. SITUBONDO	3,64	2,76	2,85	3,3	3,48		3,13	0,06	REGULER
86	KAB. SLEMAN	2,92	2,98	3,12	3,24	2,8	2,67	2,99	-0,05	KPPN IKN
87	KAB. SRAGEN	3,96	3,49	3,33	3,47	3,45	3,67	3,51	0,14	KPPN IKN
88	KAB. SUBANG	2,76	2,93	2,95	2,55	2,83		2,82	0,14	REGULER
89	KAB. SUKABUMI	2,88	2,55	2,73	1	2,7		2,36	0,51	REGULER
90	KAB. SUKOHARJO	3,92	3,42	3,59	3,74	3,83	3,83	3,69	0,24	KPPN IKN
91	KAB. SUMBAWA	3,56	1,64	2,87	2,7	2,8		2,65	-0,3	REGULER
92	KAB. SUMBAWA BARAT	2,72	2,64	3	3,53	2,75		2,96	0,2	REGULER
93	KAB. SUMENEP	2,24	2,31	3,2	2,75	2		2,6	-0,44	REGULER
94	KAB. TABALONG	3,8	3,55	3,45	3,78	3,33		3,55	0,17	REGULER
95	KAB. TABANAN	3,88	2,96	3,19	3,14	2,93		3,15	0,76	REGULER
96	KAB. TANGERANG	3,8	3,38	3,36	3,11	3,35		3,36	0,01	REGULER
97	KAB. TAPANULI SELATAN	2,08	1,8	2,41	1,95	2,02		2,09	0,19	REGULER
98	KAB. TAPANULI UTARA	2,6	1,58	2,41	2,99	2,15	1	2,19	-0,14	KPPN IKN
99	KAB. TEMANGGUNG	3,92	3,64	3,5	3,91	3,72	3,5	3,7	0,53	KPPN IKN
100	KAB. TOBA	2,96	2,36	2,68	2,96	2,08		2,31	0,14	KPPN IKN
101	KAB. TRENGGALEK	3,92	3,31	3,7	3,23	3,82		3,57	0,15	REGULER
102	KAB. TUBAN	3,8	2,82	3,29	3,77	3,18		3,32	0,59	REGULER
103	KAB. WAKATOB	1	1	1,18	1	1		0,94	-0,67	KPPN IKN
104	KAB. WONOGIRI	3,96	3,24	3,56	3,44	3,93	3,9	3,62	0,1	KPPN IKN
105	KAB. WONOSOBO	3,36	2,71	3,09	3,1	2,85	1,6	2,85	0,08	KPPN IKN
106	KOTA AMBON	3,8	2,8	2,99	3,3	3,03		3,1	0,23	REGULER
107	KOTA BALIKPAPAN	3,6	3,64	3,21	3,16	3,67	4	3,5	0,09	KPPN IKN
108	KOTA BANDA ACEH	3,36	3,02	3,18	2,89	2,67		3,01	0,61	REGULER
109	KOTA BANDAR LAMPUNG	2,16	1,93	2,5	2,71	2,15		2,32	-0,14	REGULER
110	KOTA BANDUNG	3,92	3,8	3,94	4	3,97		3,93	0,11	REGULER
111	KOTA BANJARBARU	1,92	2,11	2,28	1,2	2,22		1,98	-0,25	REGULER
112	KOTA BANJARMASIN	3,8	3,58	3,5	3,3	3,8		3,57	0,26	REGULER
113	KOTA BATAM	3,88	3,2	3,23	3,04	3,55		3,32	0,97	REGULER
114	KOTA BATU	3,24	2,55	3,04	2,98	2,02	3	2,74	0,47	KPPN IKN
115	KOTA BEKASI	4	3,45	3,56	3,57	3,65		3,6	0,39	REGULER
116	KOTA BINJAI	3	2,51	3,32	2,4	1,93		2,66	0,11	REGULER
117	KOTA BITUNG	3,36	2,98	2,82	2,76	2,52		2,83	-0,07	REGULER
118	KOTA BOGOR	3,76	3,47	3,35	3,49	3,97		3,57	0,22	REGULER
119	KOTA BUKITTINGGI	2,28	2,22	2,06	1,01	2,12		1,92	-0,03	REGULER
120	KOTA CILEGON	1,72	2,18	2,36	2,71	1,73		2,2	-0,11	REGULER
121	KOTA CIMAH	3,88	3,24	3,53	3,79	3,88		3,63	0,12	REGULER
122	KOTA CIREBON	4	3,05	3,31	3,23	3,32		3,31	0,36	REGULER
123	KOTA DENPASAR	2,84	2,65	3,53	3,77	3,63		3,35	-0,08	REGULER
124	KOTA DEPOK	3,92	3,31	3,49	3,01	3,73		3,45	0,04	REGULER
125	KOTA DUMAI	3,8	2,76	2,99	3,11	3,82		3,22	0,29	REGULER
126	KOTA JAMBI	3,84	3,18	3,53	3,63	3,35		3,48	0	REGULER
127	KOTA JAYAPURA	1,64	1,49	1,78	2,64	1,63		1,85	0,22	REGULER
128	KOTA KEDIRI	4	3,2	3,27	3,34	3,47		3,38	0,18	REGULER
129	KOTA KUPANG	2,4	2,11	2,73	2,82	1,87		2,42	-0,11	REGULER
130	KOTA MADIUN	4	3,51	3,78	3,97	3,87		3,8	0,09	REGULER
131	KOTA MAGELANG	3,72	3,16	3,41	3,29	3,33	3,1	3,32	0,69	KPPN IKN
132	KOTA MAKASSAR	3,72	3,31	3,67	3,59	3,95		3,64	0,5	REGULER
133	KOTA MALANG	3,76	3,29	3,61	2,7	3,67	2,37	3,27	0,34	KPPN IKN
134	KOTA MANADO	3	2,38	3,03	2,95	2,3		2,74	-0,28	REGULER
135	KOTA MATARAM	3,92	3,38	3,42	3,37	3,53	3,4	3,47	0,26	KPPN IKN
136	KOTA MEDAN	1,56	2,04	2,85	2,76	1,98		2,37	0,6	REGULER
137	KOTA MOJOKERTO	4	3,4	3,65	3,25	3,87		3,6	0,02	REGULER
138	KOTA PADANG	3,56	2,95	3,39	2,81	3,18		3,16	0,09	REGULER
139	KOTA PADANG PANJANG	3,72	2,73	3,15	2,99	2,62		2,99	0,58	REGULER
140	KOTA PALEMBANG	2,2	2,27	3,01	3,1	2,73		2,74	-0,21	REGULER

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2024 Pada 125 Kota/Kabupaten Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Periode Tahun 2017-2022

Gambaran Umum

Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan program bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden, sebagai inisiatif dari pemerintah pusat untuk mendorong implementasi program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota.

Pada bulan Juni tahun 2024 Kementerian Komdigi telah memfasilitasi kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi *smart city* dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (*quick win*) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (*smart city*).

Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (*smart city*) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD;
3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), serta kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*).

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah yang dinilai berdasarkan *progress* serta hasil yang dicapainya. Adapun metode evaluasi yang dilakukan yakni dengan pengisian form penilaian mandiri (*self-assessment*) yang kemudian dikonfirmasi kevalidan data dan informasinya dengan metode wawancara oleh para praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).

Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Bobot Penilaian	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program Kota Cerdas (Smart City) (Baseline)	10%	Perencanaan	Ketersediaan dokumen legal perencanaan Kota Cerdas (Smart City)
		Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
Keluaran program Kota Cerdas (Smart City) (Output)	20%	Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Kota Cerdas (Smart City) (Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (Smart City))
		Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Keamanan Informasi	Ketersediaan kebijakan/peraturan di daerah terkait pelaksanaan keamanan informasi, dan inisiatif pemerintah daerah dalam menjadi keamanan informasi terhadap infrastruktur, dan aplikasi
Hasil program Kota Cerdas (Smart City) (Outcome)	30%	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Kota Cerdas (Smart City)	Keterlaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan program yang tertuang pada dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City)
		Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi
Dampak program Kota Cerdas (Smart City) (Impact)	20%	Hasil Survei	Pengukuran dampak implementasi program pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City) melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.
Program Quick Win	20%	Pelaksanaan	Perumusan, pelaksanaan dan keberlanjutan Quick Win
		Manajemen Risiko	Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (*road map*) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Road map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City); Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment;
- Wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Dampak pembangunan Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi;

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2024

BASELINE

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perencanaan	Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1. Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	4
	Aktivitas Dewan Smart City	2. Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	3.6
	Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	3. Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	3.8
Realisasi	Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	4. Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3.8
	Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	5. Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3.8
Rata-Rata			3.8

OUTPUT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Kebijakan Smart city	Ketersediaan Peraturan Smart city	6. Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang smart city sudah	4

		tersedia setelah Daerah Anda menjalani Program Gerakan Menuju 100 Smart city?	
Kelembagaan Smart city	Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	7. Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini?	3.2
	Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	8. Apakah fungsi Tim Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini?	3.2
	Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	9. Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD?	3.8
	Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	10. Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan smart city di daerah?	3
Anggaran Smart city	Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	11. Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?	3.8
	Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	12. Sejauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai implementasi smart city?	3.8
Keamanan Informasi	Ketersediaan Kebijakan Keamanan Informasi	13. Apakah tersedia kebijakan mengenai keamanan informasi? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Data dan Informasi	14. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan data dan informasi?(mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.8
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Aplikasi	15. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan seluruh aplikasi berbasis web dan mobile yang dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.8

Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Infrastruktur	16. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan infrastruktur? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6
Rata-Rata			3.55

OUTCOME

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Program	Program Smart Governance di tahun berjalan	17. Sejauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	4
	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	18. Sejauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	4
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	2
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20. Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	2
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21. Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3
	Inovasi Pelayanan Publik	22. Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	3
	Program Smart Branding di tahun berjalan	23. Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	4
	Kemudahan Berusaha	24. Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	4
	Kemudahan Berusaha	25. Sejauh mana realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir? (data pertumbuhan realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir)	1
	Wajah Kota	26. Sejauh mana visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) telah ditetapkan dan digunakan?	3.8

Program	Program Smart Economy di tahun berjalan	27. Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	3.8
	Kesejahteraan Masyarakat	28. Sejauh mana persentase penduduk miskin? (Tahun Terakhir)	4
	Kesejahteraan Masyarakat	29. Sejauh mana IPM di daerah Anda? (tahun terakhir)	3
	Program Smart Living di tahun berjalan	30. Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	31. Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	32. Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan Imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	33. Sejauh mana cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	2.8
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	34. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan akses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	35. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	36. Sejauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan)?	3
	Program Smart Society di tahun berjalan	37. Ssejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	38. Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda? (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)	3

Program	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	39. Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda? (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)	4
	Kebencanaan	40. Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	3.8
	Kebencanaan	41. Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	3.8
	Kebencanaan	42. Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	3.4
	Program Smart Environment di tahun berjalan	43. Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	3.8
	Pengelolaan Sampah	44. Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	3.8
	Pengelolaan Sampah	45. Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah	3.8
Rencana Aksi	Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	46. Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.8
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart city	47. Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.8
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	48. Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.8
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	49. Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.6
Rata-Rata			3.45

IMPACT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Smart Governance	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	50. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dapat diakses secara daring/online?	3.8
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	51. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas?	3.8
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	52. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	53. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/program?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	54. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas/mekanisme/kanal/ruang untuk memberikan masukan guna perbaikan kebijakan/layanan/program sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	55. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masukan dari masyarakat terkait kebijakan/layanan/program telah direspon sesuai standar waktu yang ditentukan?	3.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	56. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat keterbukaan informasi tentang program dan	3.8

		seluruh aktivitas pemerintah daerah?	
Smart Governance	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	57. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang sudah terintegrasi?	2.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	58. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/akademisi/komunitas lainnya?	3.8
Smart Branding	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	59. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kota/kabupaten saya memiliki destinasi/atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung?	3.8
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	60. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan promosi destinasi/atraksi pariwisata secara daring sudah tersedia?	3.8
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	61. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan rekreasi dan fasilitas budaya dapat dipesan secara daring?	3.8
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	62. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online/daring sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan	63. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	3.8

	Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	rata nilai Pemerintah Daerah menyediakan berbagai program insentif untuk kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi?	
Smart Branding	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	64. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal sudah tersedia?	3.8
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	65. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama, dsb) dengan ciri khas daerah?	3.8
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	66. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah memiliki visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah?	3.8
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	67. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) kota/kabupaten saya telah dikenal oleh masyarakat di luar kota/kabupaten?	3.8
Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	68. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	3.8
	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	69. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	3.8

Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	70. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pemerintah daerah telah memberikan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	71. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	72. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	73. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program literasi UMKM Digital sudah tersedia?	3.8
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	74. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online sudah tersedia?	3.8
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	75. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran non-tunai (QRIS, dompet digital, dsb) sudah tersedia?	3.6
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	76. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan sudah tersedia?	3.8
Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata	77. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	3.8

	Ruang Wilayah (Harmony)	rata nilai terdapat informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring/online?	
Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	78. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tempat tinggal saya sudah layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)?	3.8
	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	79. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	80. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	81. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi riwayat kesehatan saya dapat saya akses secara daring/online?	3.8
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	82. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah sudah tersedia?	3.8
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	83. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai seluruh wilayah kabupaten/kota saya memiliki akses internet dan telekomunikasi yang memadai?	3.8
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana	84. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	3.8

	Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	rata nilai infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb) sudah tersedia?	
Smart Living	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	85. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota/kabupaten sudah tersedia?	3.8
Smart Society	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	86. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat berbagai komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang?	3.8
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	87. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb?	3.8
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	88. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis?	3.8
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	89. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan?	3.8
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar	90. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden	3.8

	Yang Efisien (Pendidikan)	pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat?	
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	91. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu?	3.8
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	92. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif?	3.8
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	93. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif?	3.8
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	94. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan terselesaikan dengan cepat?	3.8
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	95. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai alat pemantauan dan pengendalian kualitas udara/air/tanah/hutan sudah tersedia?	3.8
	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	96. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat upaya pengurangan pencemaran	3.8

		udara/air/tanah/hutan yang dikelola secara terpadu?	
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	97. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai telah terjadi perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan?	3.8
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	98. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	99. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta telah berjalan?	3.8
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	100. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst?	3.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	101. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW saya telah terpenuhi dan kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW saya tidak pernah/semakin berkurang?	3.8
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	102. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro)?	3.8

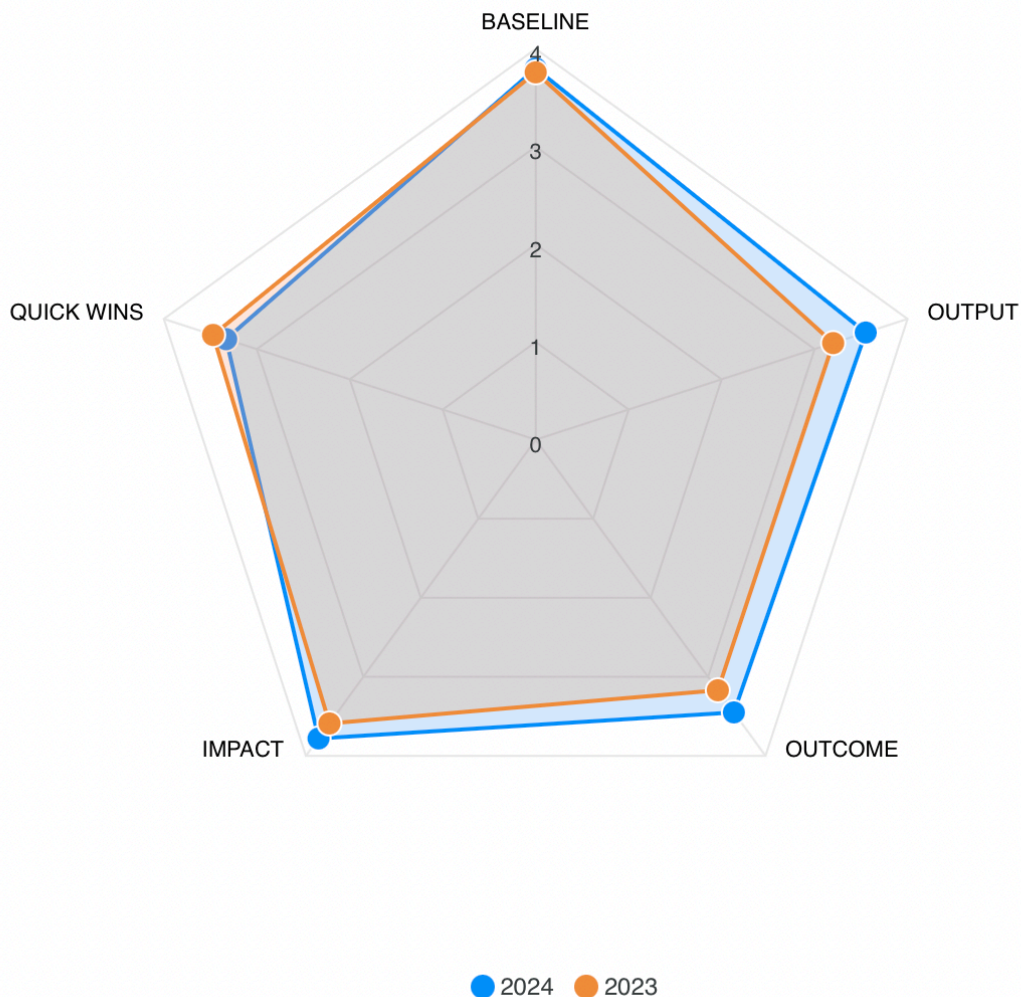
Smart Environment	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	103. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah?	3.8
Rata-Rata			3.78

QUICK WINS

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perumusan inovasi	Perumusan inovasi	104. Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	3.6
Daya tarik inovasi	Daya tarik inovasi	105. Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	3.8
Manfaat inovasi	Manfaat inovasi	106. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	3.4
Keunikan inovasi	Keunikan inovasi	107. Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	3.8
Peluang kemitraan	Peluang kemitraan	108. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	3.2
Potensi pengembangan	Potensi pengembangan	109. Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	3.2
Keberlangsungan	Keberlangsungan	110. Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	3.4
Sumber daya	Sumber daya	111. Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan	3.6

		menjalankan inovasi quick wins tersedia?	
Manajemen Risiko	Identifikasi risiko	112. Se jauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	3.2
Manajemen Risiko	Mitigasi risiko	113. Se jauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	2.8
Keberlanjutan	Keberlanjutan	114. Se jauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	2
Keberlanjutan	Keberlanjutan	115. Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	4
Rata-Rata			3.33

Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023 dan 2024



Kekuatan

1) Hafni Septiana Nur Endah (IKTII)

- a. Kehadiran pj Bupati, didampingi para pimpinan SKPD serta perwakilan dari SKPD yang ada, menunjukkan komitmen kabupaten Tabalong untuk bersama sama melaksanakan program kegiatan Smart City kabupaten Tabalong.
- b. Kabupaten Tabalong memiliki potensi di bidang pertanian, wisata dan sumber daya energi yang besar, mampu menyokong terbentuknya IKN yang baru.

2) Harya Damar Widiputra (Perbanas Institute)

- a. Kabupaten Tabalong memiliki potensi ekonomi yang signifikan di sektor energi dan pertambangan, terutama sebagai salah satu penghasil batu bara di Kalimantan Selatan.
- b. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah ini memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah.
- c. Selain itu, Tabalong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ke Kalimantan Tengah, yang mendukung konektivitas antarwilayah.
- d. Pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan wilayah melalui digitalisasi, yang menjadi landasan penting dalam pembangunan smart city. Potensi masyarakat yang aktif dan mendukung inovasi lokal juga merupakan modal sosial yang penting untuk keberhasilan program smart city.

3) Herry Abdul Aziz (Kominfo)

- a. Keberadaan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2020 tentang Masterplan Pengembangan Smart City 2019-2024 mengindikasikan adanya komitmen dan keseriusan kepala daerah dalam mencapai tujuan smart city yang telah ditetapkan.
- b. Pemanfaatan Google Form untuk efisiensi pelaksanaan survei ke masyarakat secara online.

4) Iqbal Rosyidi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

- a. Komitmen pimpinan relatif tinggi dan OPD telah melakukan koordinasi dengan cukup baik.
- b. Telah memiliki banyak sekali inovasi untuk pelayanan kepada masyarakat.
- c. Sudah memiliki perhatian terhadap keamanan data dan informasi.

5) Mardiana (Perbanas Institute)

- a. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, baik saat penyusunan masterplan, pelaksanaan, sampai pada saat evaluasi.
- b. Dukungan dana kuat untuk program-program smart city, dan dapat ditingkatkan pada program dan Quick Wins baru per tahunnya.
- c. Program-program sosialisasi sudah dilakukan dengan baik

Kelemahan

1) Hafni Septiana Nur Endah (IKTII)

- a. Masih belum semua aplikasi berbasis website dan mobile milik pemerintah kabupaten Tabalong dilakukan pertetrasi test dan jaminan Kerawanan source code
- b. Perlunya perhatian dalam pelaksanaan Survey khususnya yang Survey yang dilakukan secara on line,
- c. Rencana Aksi Smart City (SDM, Aplikasi, Infrastruktur dan Literasi) masih belum merata/kurang di setiap SKPD, khususnya dalam pengembangan SDM terkait IT.

2) Harya Damar Widiputra (Perbanas Institute)

- a. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Tabalong, terutama di daerah pedesaan, menjadi tantangan utama dalam mewujudkan smart city yang inklusif.
- b. Ketergantungan pada sektor pertambangan juga menjadi risiko jangka panjang bagi diversifikasi ekonomi daerah. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama untuk mendukung adopsi teknologi dalam kegiatan sehari-hari.
- c. Anggaran daerah yang terbatas juga menjadi kendala dalam membangun infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi smart city secara menyeluruh.

3) Herry Abdul Aziz (Kominfo)

- a. Tidak semua responden siap mengisi formulir survei secara online sehingga pelaksanaannya dibuat 2 cara, yaitu online dan offline.
- b. Pelaksanaan offline dilakukan dengan jalan mencetak formulir untuk diisi secara manual. - Tidak melakukan proses pendekatan risiko yang sistematis terhadap implementasi quick win.
- c. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam suatu tahapan kegiatan.
- d. Pendekatan ini diharapkan dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif dari peristiwa yang tidak diinginkan.

4) Iqbal Rosyidi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

- a. SPBE sebagai bagian dari Smart Government belum optimal.
- b. Infrastruktur dasar pendukung smart city seperti jalan yang berkualitas dan mantap masih relatif rendah.

5) Mardiana(Perbanas Institute)

- a. Dari poin evaluasi yang masih rendah adalah realisasi investasi.
- b. Secara umum anggaran cukup besar, akan tetapi diharapkan investasi juga dapat menjadi bagian pendukung pelaksanaan program.
- c. Kegiatan Dewan Smart City masih belum optimal.
- d. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan, termasuk juga di antaranya tenaga TI.

Rekomendasi

1) Hafni Septiana Nur Endah (IKTII)

- a. Master Plan Smart City yang ada saat ini adalah Masterplan Smart City 2019 -2024, Untuk itu perlu penyusunan kembali (perbaikan /revisi) dengan mempertimbangkan kembali kegiatan dan program Smart City yang disesuaikan dengan RPJMD.
- b. Untuk terlaksana pembangunan Keamanan Informasi, perlu ada kebijakan berbasis Perban BSSN no 4 th 2021 yang mengatur implementasi keamanan informasi pada keamanan data, keamanan pada aplikasi dan keamanan pada Infrastruktur.
- c. Keamanan Data untuk menjamin kerahasiaan, keamanan, keutuhan, kenirsangkalan dan ketersediaan data, antara lain dilakukan penerapan sistem pencadangan secara berkala, menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi - Keamanan Aplikasi dengan melakukan identifikasi persyaratan keamanan minimum, pemeriksaan source code, penetrasi test dan mengidentifikasi kerentanan aplikasi sebelum aplikasi yg berbasis web dan mobile (yang dimiliki pemda Tabalong) diluncurkan.

- d. Keamanan Infrastruktur dengan melakukan pengamanan pada infrastruktur TIK milik Pemda, Jaringan Intra (JI), Sistem Penghubung Layanan (SPL), dan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional antara lain memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi, melakukan back up informasi dan aplikasi yang berada di Pusat Data secara berkala dan memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan Internet Protocol
- e. Manajemen Resiko perlu dilakukan/dibuat untuk setiap program kegiatan Smart City Kabupaten Tabalong
- f. Dalam Pelaksanaan survey dalam rangka mengetahui impact dari implementasi Smart City perlu mendapat perhatian dalam penentuan Responden, maupun petugas survey yang harus memahami isi pertanyaan yang ada disetiap sub dimensi Smart City.

2) Harya Damar Widiputra (Perbanas Institute)

- a. Kabupaten Tabalong dapat memulai implementasi smart city dengan fokus pada diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor agrikultur dan UMKM yang berbasis teknologi, seperti penggunaan solusi smart farming dan pemasaran digital.
- b. Pengembangan infrastruktur komunikasi di wilayah pedesaan perlu diprioritaskan untuk memastikan akses yang merata.
- c. Program literasi digital yang terarah perlu digalakkan, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan dan pelaku usaha lokal, untuk meningkatkan keterampilan dan adopsi teknologi.
- d. Kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah pusat sangat penting untuk mendukung pendanaan dan pengembangan teknologi yang relevan.
- e. Dengan strategi yang terfokus pada diversifikasi ekonomi dan penguatan infrastruktur digital, Kabupaten Tabalong dapat membangun smart city yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.

3) Herry Abdul Aziz (Kominfo)

- a. Diharapkan isi peraturan bupati tentang smart city yang akan dibuat ditahun 2025 agar mengakomodir kebijakan-kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2022 tentang Perkotaan, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE
- b. Sebelum menggunakan Google Form, pastikan kesiapan responden dalam mengisi formulir, kondisi internet, maupun keberadaan data publik yang tersimpan di google.
- c. Dua metode pengisian memunculkan inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Membuat panduan umum Manajemen Risiko Smart City berbasis Permen PANRB Nomor 5 tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE yang dipadu dengan materi bimtek manajemen risiko smart city.
- e. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya ke semua dimensi sesuai dengan pedoman. Penerapan ini berguna untuk menghadapi ketidakpastian.

4) Iqbal Rosyidi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

- a. Mohon agar kebijakan mengenai keamanan informasi dapat diakselerasi menjadi peraturan daerah, sehingga menjadi perhatian bagi seluruh Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.
- b. Inovasi yang sangat banyak memerlukan pemeliharaan yang baik sehingga program terus berjalan.
- c. Untuk itu mohon disiapkan sumber daya yang cukup.
- d. Untuk evaluasi ke depan mohon agar dapat menyiapkan dokumentasi seluruh program/kegiatan dan data dukung terkait.

5) Mardiana (Perbanas Institute)

- a. Beberapa hal yang baik tetap ditingkatkan, dan dilanjutkan.
- b. Untuk investasi mungkin dapat dihitung ulang agar nilai bisa dapat maksimal
- c. Kegiatan kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal ditingkatkan, media dewan smart city diaktifkan
- d. Integrasi SPBE dan Smart City untuk mendukung visi misi daerah.